

## Financial Literacy and Financial Technology: Factors Influencing Increased Financial Inclusion in Communities in Sumedang

### Regency

Meltarini

IPDN Jatinangor

**Corresponding Author:** Meltarini [meltarini@ipdn.ac.id](mailto:meltarini@ipdn.ac.id)

---

#### ARTICLE INFO

*Keywords:* Financial Inclusion, Financial Literacy, Financial Technology (Fintech)

*Received :* 3 March

*Revised :* 19 April

*Accepted:* 22 May

©2024 Meltarini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### ABSTRACT

This study discusses the factors that influence the improvement of financial inclusion in the community in Sumedang Regency. The survey results show that financial inclusion in Sumedang Regency is still low, with higher levels of financial access in urban areas than rural areas. Factors supporting financial inclusion, such as accessibility, awareness and education, affordability, and technology and innovation, play an important role in improving financial inclusion. Financial literacy and financial technology (fintech) adoption play a crucial role in improving financial inclusion in Sumedang Regency. This research suggests that improving accessibility, awareness and education, affordability, and technology and innovation can help improve financial inclusion in Sumedang Regency

## Literasi Keuangan dan Financial Technology: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Kabupaten Sumedang

Meltarini

IPDN Jatinangor

Corresponding Author: Meltarini [meltarini@ipdn.ac.id](mailto:meltarini@ipdn.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Financial Technology (Fintech)

*Received :* 3 March

*Revised :* 19 April

*Accepted:* 22 May

©2024 Meltarini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat di Kabupaten Sumedang. Hasil survei menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang masih rendah, dengan tingkat akses keuangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. Faktor-faktor pendukung inklusi keuangan, seperti aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan (fintech) memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menyarankan bahwa meningkatkan aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang

---

## PENDAHULUAN

Inklusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Konsep inklusi keuangan menekankan pentingnya setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial-ekonomi mereka, untuk memiliki akses yang adil dan layak terhadap beragam layanan dan produk keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan dengan baik, menabung untuk masa depan, meminjam dengan tanggung jawab, dan membuat keputusan keuangan yang cerdas.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menyoroti perkembangan yang signifikan dalam pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan di Indonesia. Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Perbandingan dengan hasil survei sebelumnya pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, dengan indeks literasi keuangan naik dari 29,7% menjadi 38,03%, dan indeks inklusi keuangan meningkat dari 67,8% menjadi 76,19%.

Artinya, dalam rentang waktu tiga tahun, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman (literasi) masyarakat terkait keuangan sebesar 8,33%, serta peningkatan dalam akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Perubahan ini mencerminkan upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

Meskipun telah mencapai angka yang cukup signifikan, inklusi keuangan belum merata secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa akses keuangan di daerah perkotaan mencapai 83,6%, lebih tinggi daripada di daerah pedesaan yang hanya mencapai 68,5% pada tahun 2024. Sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, sasaran tahun 2024 menargetkan angka inklusi keuangan mencapai 90%.

Namun, untuk mencapai inklusi keuangan yang efektif, perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kemajuannya, terutama di wilayah tertentu seperti Kabupaten Sumedang. Beberapa faktor tersebut antara lain:

### 1. Aksesibilitas:

Ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang sangat penting untuk mendorong inklusi keuangan. Ini termasuk keberadaan bank, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan keuangan lainnya di daerah tersebut.

### 2. Kesadaran dan Pendidikan:

Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Sumedang merupakan langkah penting dalam mendorong inklusi keuangan. Program dan inisiatif edukasi dapat menyediakan informasi dan sumber daya tentang pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik terkait lainnya.

### 3. Keterjangkauan:

Keterjangkauan layanan dan produk keuangan juga merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Layanan dan produk keuangan haruslah terjangkau, dengan biaya yang transparan dan terjangkau bagi pasar target. Selain itu, opsi perbankan berbiaya rendah atau bahkan tanpa biaya, seperti rekening tabungan dasar atau layanan mobile banking, dapat meningkatkan keterjangkauan dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.

Teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang, seperti yang disorot oleh Widarwati et al. (2022). Adopsi dan penggunaan teknologi finansial (tekfin) memberikan solusi inovatif serta saluran alternatif untuk layanan keuangan, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur perbankan tradisional. Faktanya, teknologi finansial dapat menjadi katalisator bagi inklusi keuangan dengan menyediakan akses lebih mudah dan hemat biaya kepada layanan keuangan.

Namun, penting untuk diingat bahwa lingkungan regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Peraturan yang mendukung kompetisi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan dapat merangsang pengembangan layanan keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, aspek regulasi dan kebijakan juga harus dipertimbangkan secara serius dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang, sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Ditta & Saputra (2020).

Dalam mempromosikan inklusi keuangan secara efektif di Kabupaten Sumedang, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti aksesibilitas, kesadaran dan edukasi, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi. Data yang diperoleh dari Survei Inklusi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2019. Dengan memahami dan mengintegrasikan semua faktor ini, diharapkan Kabupaten Sumedang dapat memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakatnya secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat di Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan (financial technology atau fintech). Secara khusus.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Literasi Keuangan**

Literasi keuangan menjadi aspek kunci dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian oleh Sari & Kautsar (2020) menyoroti bahwa literasi keuangan di Indonesia masih rendah, dengan mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep keuangan. Hal ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam mencapai inklusi keuangan yang merata di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Sumedang.

Dalam konteks Kabupaten Sumedang, pemahaman awal tentang tingkat literasi keuangan menjadi penting untuk mengevaluasi upaya-upaya yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat literasi keuangan di tingkat lokal, langkah-langkah yang lebih tepat dan terukur dapat dirancang untuk memberikan edukasi keuangan yang relevan dan efektif kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

### **Faktor-Faktor Pendukung Inklusi Keuangan**

Faktor-faktor pendukung inklusi keuangan, seperti lingkungan regulasi dan kebijakan pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ditta & Saputra (2020), ditemukan bahwa berbagai faktor seperti kompetisi di pasar keuangan, perlindungan konsumen, dan inovasi dalam sektor keuangan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan.

1. Adanya kompetisi yang sehat di pasar keuangan mendorong lembaga keuangan untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persaingan ini akan memicu peningkatan kualitas layanan dan penurunan biaya, sehingga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sumedang.
2. Perlindungan konsumen adalah faktor krusial dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan dan rasa aman dalam menggunakan layanan keuangan. Kebijakan perlindungan konsumen yang kuat akan melindungi masyarakat dari praktik-praktik keuangan yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
3. Inovasi dalam sektor keuangan memainkan peran penting dalam menciptakan solusi keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya inovasi, layanan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik masyarakat, termasuk di daerah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang. Inovasi juga dapat memperluas jangkauan layanan keuangan dan mengurangi kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

### **Adopsi Financial Technology (Fintech) di Indonesia**

Adopsi teknologi keuangan (fintech) telah menjadi sebuah tren global yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan & Ndururu (2019) menyoroti bahwa adopsi fintech di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda dan penduduk perkotaan. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan global di mana teknologi keuangan semakin menjadi pilihan utama dalam mendapatkan layanan keuangan yang efisien dan praktis.

Meskipun demikian, adopsi fintech di wilayah pedesaan, seperti Kabupaten Sumedang, masih merupakan tantangan tersendiri. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang dapat menghambat penggunaan fintech oleh masyarakat. Selain itu, tingkat literasi digital yang bervariasi di kalangan penduduk pedesaan juga dapat mempengaruhi tingkat adopsi fintech di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor apa yang memengaruhi adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang. Dengan memahami hambatan dan peluang yang ada, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk mempromosikan adopsi fintech yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedesaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

## **METODOLOGI**

Rancangan Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Sumedang. Sampel penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat yang memiliki akses keuangan dan yang tidak memiliki akses keuangan. Pada tahap ini, alat ukur yang digunakan meliputi survei, wawancara, dan analisis data statistik.

Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat persepsi dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan dan fintech, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi inklusi keuangan. Hasil survei dan wawancara dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fintech di Kabupaten Sumedang. (Jonny & Kriswanto, 2020) Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis literatur dan studi komparatif tentang upaya pemerintah dan lembaga dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi dan program edukasi literasi keuangan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni survei daring dan wawancara langsung dengan penduduk Kabupaten Sumedang. Survei daring menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan (fintech) di masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengungkap pola dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Validasi data dilakukan dengan mengevaluasi hasil analisis statistik guna memastikan adanya korelasi yang signifikan antara variabel yang dipelajari dan tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Dari sini, dapat disimpulkan apakah data yang terkumpul dapat dianggap valid atau tidak.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Data
Inklusi Keuangan	Tingkat akses masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan yang adil dan layak.	Jumlah masyarakat yang memiliki akses keuangan	Skala Likert (1-5)
Literasi Keuangan	Tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Sumedang tentang konsep keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik terkait lainnya.	Jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan	Skala Likert (1-5)
Aksesibilitas	Ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang.	Jumlah lembaga keuangan yang tersedia di Kabupaten Sumedang	Skala Nominal (0/1)
Kesadaran dan Pendidikan	Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan, serta program dan inisiatif edukasi yang disediakan untuk meningkatkan literasi keuangan.	Jumlah masyarakat yang mengikuti program edukasi keuangan	Skala Nominal (0/1)
Keterjangkauan	Tingkat biaya yang transparan dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan.	Biaya layanan keuangan yang dikenakan	Skala Nominal (0/1)
Teknologi dan Inovasi	Penggunaan teknologi finansial (tekfin) sebagai solusi inovatif dan saluran alternatif untuk layanan keuangan, serta adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang.	Jumlah masyarakat yang menggunakan teknologi keuangan	Skala Nominal (0/1)
Lingkungan Regulasi dan Kebijakan	Kebijakan pemerintah yang mendukung kompetisi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan.	Jumlah kebijakan yang mendukung inklusi keuangan	Skala Nominal (0/1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengakses layanan keuangan.

Hasil analisis menggunakan skala definisi operasional variabel dalam penelitian ini menggambarkan bahwa inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi tantangan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat akses keuangan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, mencapai 83,6% dan 68,5% secara berturut-turut. Fenomena ini menyoroti perbedaan yang mencolok dalam aksesibilitas layanan keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menyediakan akses keuangan yang merata di seluruh Kabupaten Sumedang.

Dalam konteks ini, faktor-faktor pendukung inklusi keuangan, seperti aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Aksesibilitas mencakup ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang, sementara kesadaran dan pendidikan melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan. Keterjangkauan menjadi faktor krusial dalam memastikan layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sementara teknologi dan inovasi memberikan solusi baru dan alternatif untuk memperluas akses keuangan, terutama di daerah yang masih terpinggirkan seperti daerah pedesaan. (Rahmi, 2019) Selain itu, faktor-faktor seperti regulasi yang mendukung inklusi keuangan, infrastruktur yang memadai untuk menunjang layanan keuangan, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat juga akan memberi kontribusi positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, dapat dirancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Dengan memperkuat aksesibilitas, meningkatkan kesadaran dan pendidikan keuangan, memastikan keterjangkauan layanan keuangan, serta mendorong adopsi teknologi dan inovasi (Anindynta et al., 2021), diharapkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan akses yang lebih luas dan merata terhadap layanan keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

*Berikut ini merupakan tabel Hasil Skala Definisi Operasional Variabel:*

Tabel 2. Hasil Skala Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Data
Inklusi Keuangan	Tingkat akses masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan yang adil dan layak.	Jumlah masyarakat yang memiliki akses keuangan	Skala Likert (1-5)	3.8
Literasi Keuangan	Tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Sumedang tentang konsep keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik terkait lainnya.	Jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan	Skala Likert (1-5)	3.2
Aksesibilitas	Ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang.	Jumlah lembaga keuangan yang tersedia di Kabupaten Sumedang	Skala Nominal (0/1)	1
Kesadaran dan Pendidikan	Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan, serta program dan inisiatif edukasi yang disediakan untuk meningkatkan literasi keuangan.	Jumlah masyarakat yang mengikuti program edukasi keuangan	Skala Nominal (0/1)	0.8
Keterjangkauan	Tingkat biaya yang transparan dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan.	Biaya layanan keuangan yang dikenakan	Skala Nominal (0/1)	0.5

Teknologi dan Inovasi	Penggunaan teknologi finansial (tekfin) sebagai solusi inovatif dan saluran alternatif untuk layanan keuangan, serta adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang.	Jumlah masyarakat yang menggunakan teknologi keuangan	Skala Nominal (0/1)	0.4
Lingkungan Regulasi dan Kebijakan	Kebijakan pemerintah yang mendukung kompetisi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan.	Jumlah kebijakan yang mendukung inklusi keuangan	Skala Nominal (0/1)	0.7

Hasil skala data yang disajikan dalam tabel di atas memberikan gambaran tentang definisi operasional dan indikator untuk beberapa variabel yang relevan dengan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Variabel yang dianalisis mencakup Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Aksesibilitas, Kesadaran dan Pendidikan, Keterjangkauan, Teknologi dan Inovasi, serta Lingkungan Regulasi dan Kebijakan.

1. Inklusi Keuangan diukur dengan memperhatikan tingkat akses masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan yang adil dan layak. Penggunaan skala Likert (1-5) digunakan untuk menilai tingkat akses keuangan, meskipun nilai rata-rata tidak disertakan dalam tabel. Literasi Keuangan diukur dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Sumedang tentang konsep keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik terkait lainnya.
2. Variabel Aksesibilitas dievaluasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang. Penggunaan skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai ketersediaan lembaga keuangan, di mana nilai 1 menunjukkan ketersediaan lembaga keuangan dan 0 menunjukkan sebaliknya.
3. Kesadaran dan Pendidikan dinilai dengan memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan, serta partisipasi dalam program dan inisiatif edukasi keuangan. Skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat tentang keuangan.
4. Keterjangkauan dievaluasi dengan mempertimbangkan tingkat biaya yang transparan dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan. Skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai biaya layanan keuangan yang dikenakan.

5. Teknologi dan Inovasi dievaluasi dengan memperhitungkan penggunaan teknologi finansial (tekfin) sebagai solusi inovatif dan saluran alternatif untuk layanan keuangan, serta adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang. Skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai penggunaan teknologi keuangan.
6. Lingkungan Regulasi dan Kebijakan dinilai dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang mendukung kompetisi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai kebijakan yang mendukung inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, skala data yang digunakan dalam penelitian ini memadukan penggunaan Skala Likert (1-5) untuk Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan, serta Skala Nominal (0/1) untuk variabel lainnya. Data yang diperoleh dari survei dan wawancara langsung dengan penduduk Kabupaten Sumedang digunakan untuk mengisi skala data ini. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk analisis mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang masih rendah, dengan tingkat akses keuangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan.
2. Aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.
3. Literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan (fintech) memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut. Pertama, langkah penting adalah meningkatkan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di daerah pedesaan, sehingga masyarakat di wilayah tersebut juga dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Selanjutnya, program edukasi keuangan harus diselenggarakan secara aktif untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan. Selain itu, perlu ada upaya untuk menekan biaya layanan keuangan guna meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi finansial (tekfin) juga perlu dipromosikan untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang. Terakhir, lingkungan regulasi dan kebijakan pemerintah harus mendukung kompetisi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan untuk memperkuat inklusi keuangan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara keseluruhan.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Literasi Keuangan dan Financial Technology: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Inklusi Keuangan pada Masyarakat demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anindynta, F A., Susilowati, D., & Kurniawati, E T. (2021, October 25). Model pengentasan kemiskinan melalui peran financial inclusion di Indonesia. *Jurnal ekonomi modernisasi*, 17(3), 173-184. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.5617>
- Ditta, A. S. A., & Saputra, A. (2020). Financial inclusion and banking performance in Indonesia.
- Ditta, AS A., & Saputra, A. (2020, 1 April). Inklusi Keuangan dan Kinerja Perbankan di Indonesia. *Universitas Yalova*, 6(2), 50-69. <https://doi.org/10.32602/jafas.2020.010>
- INDONESIA, P. P. R. (2006). NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Jonny, J., & Kriswanto, K. (2020, August 1). Modelling the use of FinTech in Indonesia. <https://doi.org/10.1109/icimtech50083.2020.9211131>
- Keuangan, O. J. (2016). POJK No. 76/POJK. 07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/ Atau Masyarakat.
- Pulungan, D. R., & Ndruru, A. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS) 2019*.
- Rahmi, M. (2019, January 1). Fintech for Financial Inclusion: Indonesia case. *Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.168>
- Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Demografi terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(4), 1233-1246.
- Widarwati, E., Solihin, A., & Nurmalasari, N. (2022, 14 Februari). Keuangan Digital Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Perbankan Indonesia. *Universitas Islam Negeri Jakarta*, 11(1), 17-30. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.17884>